



Edisi XIII Mei-Juli 2012

Salam Redaksi

Om Swastyastu

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali kembali melaksanakan kewajiban terhadap Undang-Undang dengan menyerahkan LHP atas LKPD TA 2011. Kali ini terjadi peningkatan opini, Kab.Badung semula mendapat opini WDP,kali ini berhasil mendapatkan opini WTP.Kab. Jembrana semula TW, Kab. Bulelengdan Kab. Karangasem semula TMP kini mendapat opini WDP. Prestasi yang membanggakan...

BPK RI menjadi tuan rumah workshop bertema "Sharing Experiences on Quality Assurance Implementation Workshop". Workshop ini merupakan program dari badan pemeriksa se-Asia (ASOSAI) yang didukung oleh German International Cooperation (GIZ). Tidak hanya kali ini, pada November 2011 lalu, BPK RI juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan 19th ASEAN Summit and related Summit (ASEAN SAI Summit) di Nusa Dua, Bali.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Redaksi

Daftar Isi

- BPK GOES TO CAMPUS: BPK SINERGI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT.....**hal2
- KUNJUNGAN PESERTA SHARING EXPERIENCES ON QUALITY ASSURANCE IMPLEMENTATION WORKSHOP KE KANTOR BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI...hal2**
- PENYERAHAN LHP BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA DPRD DAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-WILAYAH BALI.....**hal3
- PEMBAHASAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI.....**hal3
- MEDIA WORKSHOP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI.....**hal4
- SOSIALISASI APLIKASI KONSOLIDASI DATA DAN PEMBAHASAN PETUNJUK TEKNIS AKSES DATA DALAM RANGKA E-AUDIT.....**hal4
- WORKSHOP JDIH BPK RI DENGAN BIRO HUKUM/BAGIAN HUKUM/SUB BAGIAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA S-WILAYAH BALI.....**hal5
- SOSIALISASI KODE ETIK DAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL/INTERNAL ADIT CHARTER (IAC) BPK RI.....**hal5
- KUNJUNGAN KERJA TIM BAKN DPR RI KE PROVINSI BALI.....**hal6
- UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE 104 TAHUN 2012.....**hal6
- KKL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.....**hal7
- Pura Uluwatu.....**hal7
- Galeri Foto.....**hal8

SHARING EXPERIENCES ON QUALITY ASSURANCE IMPLEMENTATION WORKSHOP



-Denpasar, Juni 2012

Pulau Dewata kembali menjadi tempat diselenggarakannya acara besar. Kali ini, BPK RI menyelenggarakan kegiatan workshop dengan tema "Sharing Experiences on Quality Assurance Implementation Workshop" di Hotel Santika Premiere Beach Kuta, Bali. Workshop ini merupakan program dari badan pemeriksa se-Asia (ASOSAI) yang didukung oleh German International Cooperation (GIZ). Workshop yang diselenggarakan pada 25 – 27 Juni 2012 ini dibuka oleh Ketua BPK RI (Drs. Hadi Poernomo Ak.) dan dihadiri oleh Perwakilan dari GIZ (Ms. Ruth Abraha), Sekretaris Jenderal BPK RI (Henda Ristriawan), para pejabat di lingkungan BPK RI dan auditor dari 9 Supreme Audit Institutions (SAI) atau badan pemeriksa negara-negara ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia).

Workshop ini selain membahas tentang penerapan pengendalian mutu di masing-masing badan pemeriksa juga bertujuan untuk dapat saling bertukar pengalaman dan meningkatkan kapasitas masing-masing badan pemeriksa negara-negara ASEAN terutama dalam bidang penerapan pengendalian mutu.

Pengendalian Mutu yang dimaksud adalah untuk menilai kesesuaian hasil yang dicapai dari kegiatan tertentu dengan proses yang diharapkan. Sudah sepatutnya BPK RI menetapkan Sistem Pengendalian Mutu secara efektif dalam mengevaluasi hasil pekerjaan terutama bidang pemeriksaan keuangan.

Pada hari kedua workshop para delegasi berkunjung ke kantor Perwakilan Provinsi Bali. Setelah sambutan sebagai ucapan selamat datang dari Kepala Perwakilan Provinsi Bali (Tri Heriadi), disampaikan pemaparan mengenai pariwisata Pulau Bali oleh Staf Sub Auditor Bali II (Ayu Sri Irawati). Acara dilanjutkan dengan pemaparan terkait proses pemeriksaan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Cornell Syarie) yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Kunjungan diakhiri dengan sesi foto bersama.

Workshop ditutup oleh Inspektur Utama BPK RI (Mahendro Sumardjo) dan dilanjutkan dengan kegiatan Social Program yang bertujuan untuk memperkenalkan pariwisata Pulau Bali kepada delegasi. Setelah kunjungan ke pusat oleh-oleh Krishna, rombongan bergerak menuju Pura Uluwatu. Di Pura Uluwatu delegasi tampak berdecak kagum saat menyaksikan Tari Kecak yang dibawakan oleh puluhan penari. Social Program ditutup dengan acaramakan malam bersama di tepi Pantai Jimbaran.

Denpasar, Juni 2012

Badan Pemeriksa Keuangan, Republik Indonesia (BPK RI) mengadakan sosialisasi yang diwujudkan dalam kegiatan *BPK Goes to Campus* dengan mengusung tema "BPK Sinergi untuk Kesejahteraan Rakyat". Kali ini, kegiatan dilaksanakan di Gedung Program Pasca Sarjana Lantai 3 Universitas Udayana (Unud), Denpasar, Bali pada Senin, 25 Juni 2012.

Berlaku sebagai keynote speaker adalah Ketua BPK RI (Drs. Hadi Poernomo, Ak.) dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal BPK RI (Hendar Ristriawan), Auditor Utama Keuangan Negara VI (Sjafrudin Mosii) dan Rektor Unud (Prof. Dr. I Made Bakta, SPPD). Peserta acara ini adalah para mahasiswa pasca sarjana, para Pembantu Rektor, Guru Besar, Dekan dan Dosen Unud sementara dekan Fakultas Ekonomi Unud (Prof. Dr. Wayan Ramantha, SE., Ak., MM.) bertindak sebagai moderator.

Diselenggarakannya acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait tugas, fungsi dan kewenangan serta sinergi BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin komunikasi serta meningkatkan kerjasama yang efektif antara BPK RI dengan para pemangku kepentingan, khususnya kalangan akademisi Unud. Ketua BPK RI mengungkapkan bahwa upaya memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara dengan mendorong pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan transparan mustahil dapat dilaksanakan oleh BPK sendiri tanpa bersinergi dengan lembaga negara dan instansi yang mengelola keuangan negara. Sinergi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel ini dilakukan tanpa harus mencampuri tugas dan fungsi masing-masing.



KUNJUNGAN PESERTA SHARING EXPERIENCES ON QUALITY ASSURANCE IMPLEMENTATION WORKSHOP KE KANTOR BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI

Denpasar, Juni 2012

Selasa, 26 Juni 2012 Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali kedatangan tamu. Mereka adalah peserta *Sharing Experiences on Quality Assurance Implementation Workshop* yang sedang melakukan kunjungan ke kantor perwakilan. Rombongan diterima oleh Kepala Perwakilan (Tri Heriadi) yang didampingi oleh para pejabat struktural di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali serta tim dari Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI. Mengambil tempat di Ruang Rapat Lantai 3, Kepala Perwakilan menyampaikan sambutan sebagai ucapan selamat datang. Acara dilanjutkan dengan penayangan slide tentang pariwisata Pulau Bali dengan narasi yang dibawakan oleh Staf Sub Auditorat Bali II BPK RI Perwakilan Provinsi Bali (Ayu Sri Irawati). Setelah penayangan slide, acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai proses pemeriksaan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Cornell Syarif). Saat *coffee break*, peserta tampak menikmati jajan pasar tradisional khas Bali. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi.

Sehari sebelumnya, Ketua BPK RI (Drs. Hadi Poernomo, Ak.) membuka workshop yang mengambil tempat di Hotel Santika Premiere Beach Kuta, Bali. Workshop yang berlangsung pada 25 – 27 Juni 2012 ini merupakan program dari badan pemeriksa se-Asia (ASOSAI) yang didukung oleh *German International Cooperation (GIZ)*. Pada acara pembukaan, tampak hadir Perwakilan dari GIZ (Ms. Rutha Abraha), Sekretaris Jenderal BPK RI (Hendar Ristriawan), para pejabat di lingkungan BPK RI dan auditor dari 9 Supreme Audit Institutions (SAI) atau badan pemeriksa negara-negara ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia)





Denpasar, Mei 2012

Menjalankan amanah Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali kembali melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-wilayah Bali. Penyerahan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan di auditorium Kantor Perwakilan Provinsi Bali ini digelar selama 3 hari (Senin, 28 Mei 2012 s.d Rabu, 30 Mei 2012). Pada hari pertama, dilaksanakan penyerahan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan Pemerintah Kota Denpasar, dilanjutkan dengan penyerahan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Pada hari kedua, penyerahan kepada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng. Sementara pada hari ketiga, penyerahan hasil pemeriksaan kepada Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli. Hasil pemeriksaan terhadap 8 entitas tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali mengeluarkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

"Sesuai dengan mandat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Ketentuan peraturan perundang-undangan meminta 60 hari sejak diterimanya LHP ini, maka pemerintah daerah wajib menyampaikan jawaban/penjelasan atas tindak lanjut yang dilakukan. Apabila jawaban/penjelasan atas tindak lanjut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka BPK akan menyampaikan kepada Penegak



Hukum untuk diproses sesuai ketentuan dimaksud," tegas Kepala Perwakilan (Tri Heriadi) dalam sambutan yang dibacakan sesaat setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan. Lebih lanjut, Kepala Perwakilan mengharapkan adanya keseriusan baik dari pihak eksekutif maupun legislatif di Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, khususnya tindak lanjut atas rekomendasi yang mengandung unsur kerugian Negara/Daerah.

Sementara itu, Pemerintah Daerah menyatakan apresiasi yang tinggi karena BPK RI Perwakilan Provinsi Bali telah berhasil menyelesaikan tugas melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab dan pengelolaan keuangan Negara. "Sebagai entitas, Kabupaten Bangli menyambut baik hasil pemeriksaan dimana hasil pemeriksaan tersebut merupakan cerminan kinerja pemerintah Kabupaten Bangli. Butiran temuan tim audit BPK RI akan kami jalani dan tindak lanjuti sebagai perwujudan koreksi," ujar Wakil Bupati Bangli (Sang Nyoman Sedana Arta) dalam sambutannya. Di lain kesempatan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gianyar (Drs. I Made Togog, M.Si) menyatakan bahwa opini yang dikeluarkan BPK RI merupakan pernyataan profesional dari hasil audit yang telah dilakukan. "Harapan kami, semoga Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar di masa datang bisa lebih baik demi terwujudnya transparansi laporan keuangan, good government dan clean governance," tambahnya lagi. Dengan demikian agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan selanjutnya adalah kepada Provinsi Bali yang diserahkan pada tanggal 4 Juni 2012 dan Kabupaten Badung pada tanggal 8 Juni 2012.

PEMBAHASAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI



Denpasar, Juli 2012

Dalam rangka menyamakan persepsi atas tingkat penyelesaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali mengadakan kegiatan berupa pembahasan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2012. Pembahasan yang dilaksanakan pada Senin – Selasa, 2 s.d 3 Juli 2012 lalu ini melibatkan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali dan digelar di auditorium kantor perwakilan

Selepas pembukaan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Sub Auditorat Bali II (Yohannes Manuputty), kegiatan pembahasan dilanjutkan dengan cara menyamakan data pemantauan terhadap tindak lanjut pemeriksaan antara pemegang database pemeriksaan per entitas di Sub Auditorat BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dengan tim dari Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan proses menyamakan persepsi tersebut diharapkan tercapai "kesepakatan" mengenai tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Acara Pembahasan Tindak Lanjut ini diakhiri dengan pembacaan laporan panitia oleh Kepala Sub Auditorat Bali II yang kemudian ditutup secara resmi oleh Kepala Perwakilan (Tri Heriadi).

MEDIA WORKSHOP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI



Denpasar, Juni 2012

Untuk memberikan pemahaman mengenai hasil pemeriksaan BPK RI kepada media cetak dan elektronik sehingga didapat pemahaman yang lebih baik pula dari publik mengenai hasil pemeriksaan BPK RI serta untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan media massa, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali mengadakan media workshop pada Selasa, 19 Juni 2012. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 kantor perwakilan ini dihadiri oleh para Ketua Tim Senior, para pejabat struktural di lingkungan Perwakilan Provinsi Bali, para Ketua Tim pemeriksaan LKPD TA 2011 serta jurnalis dari media cetak dan elektronik.

Setelah Kepala Perwakilan Provinsi Bali (Tri Heriadi) membuka acara secara resmi, yang dilanjutkan Kepala Perwakilan sebagai

narasumber menyampaikan pemaparan mengenai BPK RI dan Pemeriksaan Keuangan Negara, antara lain membahas tentang dasar hukum BPK, bidang tugas Anggota BPK, lingkup pemeriksaan, pengertian Keuangan Negara, jenis pemeriksaan, jenis opini BPK, pemilik kepentingan dan profil Perwakilan. Narasumber kedua adalah Kepala Sub Auditorat Bali II (Drs. Yohannes Manuputty) yang mengupas tentang pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan gambaran hasil pemeriksaan LKPD se-Provinsi Bali. Acara dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Tim Senior dari Sub Auditorat Bali II (M. Agus Arifin, SE., Ak.)

Dalam sesi tanya jawab, peserta workshop tampak antusias mengajukan pertanyaan mulai dari apakah auditor menerima tekanan/ ancaman dari pihak lain dalam menjalankan tugas pemeriksaan, bagaimana sikap BPK jika rekomendasi BPK tidak diselesaikan dan apakah ada sangsinya. Tidak hanya sampai di situ, pertanyaan peserta workshop beralih ke pendapat BPK mengenai hubungan antara korupsi, laporan keuangan entitas dan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diterima oleh entitas. Selesai sesi tanya jawab, acara ditutup secara resmi oleh Kepala Perwakilan.

SOSIALISASI APLIKASI KONSOLIDASI DATA

DAN PEMBAHASAN PETUNJUK TEKNIS AKSES DATA DALAM RANGKA E-AUDIT

ANTARA BPK RI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-WILAYAH BALI

Denpasar, Mei 2012

Dalam rangka menindaklanjuti MoU Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang telah ditandatangani Kepala Perwakilan Provinsi Bali dengan para Kepala Daerah pada tanggal 20 Juni 2011 lalu, Biro TI BPK RI, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI (Ditama Binbangkum) dan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali mengadakan Sosialisasi Aplikasi Konsolidasi Data dan Pembahasan Petunjuk Teknis Akses Data dalam Rangka e-audit antara BPK RI dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-wilayah Bali pada Selasa, 22 Mei 2012. Kegiatan sosialisasi yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali ini dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali dan staf yang membidangi masalah TI

Setelah pembukaan acara secara resmi oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali BPK RI (Tri Heriadi), Kepala Sub Direktorat Analisa Hukum dari Ditama Binbangkum (Etty Herawati, SH., MH.) memaparkan aspek hukum dalam e-audit (Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rangka

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Selanjutnya adalah penjelasan e-audit terkait Teknologi dan Informasi yang dipaparkan oleh Ida Bagus Eddy Dharma, ST dari Biro TI BPK RI.



Dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh Putu Eka Kumara Dewi, ST (LO TI Perwakilan Provinsi Bali) sebagai moderator, peserta sosialisasi tampak antusias mengajukan pertanyaan seputar teknis pelaksanaan dan rangkaian persiapan dalam implementasi e-audit di wilayahnya. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan diantaranya mengenai sejauhmana peran LO TI di entitas, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kebocoran pada pengamanan data online dan bagaimana otorisasi/keabsahan data yang ditampilkan.

WORKSHOP JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BPK RI DENGAN BIRO HUKUM/BAGIAN HUKUM/SUB BAGIAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-WILAYAH BALI

Denpasar, Mei 2012

Dalam rangka menjalin kerjasama dengan JDIH Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-wilayah Bali, JDIH BPK RI dan UJDIH Perwakilan BPK RI mengadakan workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan Biro Hukum/Bagian Hukum/Sub Bagian Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotase-wilayah Bali pada Selasa, 15 Mei 2012. Workshop yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali ini dihadiri oleh para Kepala Biro Hukum/Kepala Bagian Hukum/Kepala Sub Bagian Hukum di wilayah Provinsi Bali

Setelah pembukaan acara secara resmi oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali BPK RI (Tri Heriadi), Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali (I Dewa Putu Eka Wijaya Wardana, SH., MH.), memaparkan tentang UJDIH Provinsi Bali. Selanjutnya adalah pemaparan tentang UJDIH Perwakilan BPK yang dibawakan oleh Kepala Sub Auditorat Bali II BPK RI Perwakilan Provinsi Bali (Drs. Yohannes Manuputty) dan pemaparan tentang JDIH BPK RI oleh Kepala Direktorat Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum dari Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI (Akhmad Anang Hernady).

Dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali (I G. A. Masningrat, SH) sebagai moderator, peserta workshop tampak antusias berbagi pengalaman dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan JDIH di wilayahnya dan berharap acara seperti ini dilaksanakan tidak hanya kali ini saja tetapi dilaksanakan secara rutin. Acara ditutup secara resmi oleh Kepala Perwakilan dan diakhiri dengan sesi foto bersama antara Narasumber, Moderator dan seluruh peserta workshop.



SOSIALISASI KODE ETIK

DAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL/INTERNAL AUDIT CHARTER (IAC) BPK RI

Denpasar, Juli 2012

Inspektorat Utama BPK RI kembali mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK RI dan Piagam Pengawasan Internal atau *Internal Audit Charter* (IAC) kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Senin, 16 Juli 2012. Pada sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai Kode Etik BPK RI dan IAC kepada seluruh pegawai ini berlaku sebagai pembicara adalah Drs. M. Bayu Sabartha, MBA (Inspektur II dari Inspektorat Utama BPK RI)

Dalam kegiatan yang mengambil tempat di Auditorium kantor perwakilan tersebut, Inspektur II menjelaskan bahwa Kode Etik BPK RI awalnya berupa Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007. "Alasan perubahan Peraturan BPK No.2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI menjadi Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 diantaranya adalah berdasarkan hasil Sidang Badan BPK pada tanggal 10 Maret 2010. Selain itu Peraturan No. 2 Tahun 2007 ini disempurnakan melalui pemisahan antara Kode Etik dengan Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) dan Mekanisme Kerja," jelas Inspektur II yang pada hari itu didampingi Ida Bagus Ketut Sidhastu (Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan Provinsi Bali) sebagai Moderator.

Lebih lanjut Inspektur II menjelaskan bahwa Kode Etik sesuai Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 memiliki perbedaan dengan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 dimana Kode Etik Pada Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 diberlakukan tidak hanya kepada auditor tetapi juga kepada Anggota BPK dan seluruh pelaksana BPK dalam kaitannya dengan tugas pemeriksaan

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur II juga memaparkan tentang Tujuan, Isi serta Cakupan dari Piagam Pengawasan Internal yang terdiri dari enam hal yakni : Misi dan lingkup kegiatan, Akuntabilitas, Independensi dan persyaratan profesional, Wewenang dan tanggung jawab serta prinsip dasar pelaksanaan tugas, Hubungan internal-eksternal, Pemberlakuan IAC oleh BPK. Para pegawai tampak antusias mengajukan pertanyaan terutama berkaitan dengan Kode Etik BPK, misalnya tentang sanksi bagi auditor jika terdapat kesalahan dalam penulisan laporan hasil pemeriksaan, prosedur jika diperlukan perubahan pada Program Pemeriksaan (P2) dan pengenaan sanksi kepada auditor apakah berupa sanksi personal atau kolektif sebagai tim pemeriksa.





Denpasar, Juli 2012

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang dibentuk oleh DPR RI merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang berfungsi untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara. Salah satu tugas BAKN DPR RI yaitu melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang kemudian disampaikan kepada Komisi-komisi DPR RI sebagai bahan rapat-rapat komisi dengan mitra kerjanya. Untuk itu, Tim BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali dalam rangka melakukan klarifikasi terhadap temuan BPK RI. Tim BAKN yang terdiri dari 5 (lima) orang ini dipimpin oleh Ketua BAKN DPR RI (Dr. Sumarjati Arjose, SKM) dan melakukan kunjungan pada 4 s.d 6 Juli 2012.

Secara spesifik, tim BAKN DPR RI melakukan klarifikasi terhadap temuan pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2011 yakni pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 dan pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2012 yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2011. Pemeriksaan atas LKPD TA 2010 dan 2011 ini terutama yang berkaitan dengan temuan pemeriksaan atas

kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan atas Perundang-undangan. Tak berhenti pada Pemerintah Provinsi Bali, tim juga melakukan penelusuran terhadap Pemeriksaan BPK atas Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Tahun Buku 2010 dan 2011 (s.d 30 September 2011) yang merupakan Pemeriksaan Semester II Tahun 2011 serta temuan pemeriksaan BPK atas Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Rekening TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Udayana (Unud) yang merupakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Desember 2011.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali (Made Mangku Pastika) berharap agar pertemuan ini tidak menjadi kegiatan formalitas belaka. "Semoga pertemuan ini dapat membantu mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI di daerah dan dapat mengkaji permasalahan-permasalahan krusial yang ditemukan di daerah terkait dengan hasil pemeriksaan, untuk dicarikan solusi penyelesaian," tegas Gubernur Bali pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Bali. Sementara dari BPK RI tampak hadir Auditor Utama Keuangan Negara BPK RI (Abdul Latief), Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali (Tri Heriadi), Kepala Sub Auditorat Bali I (Ida Farida), Ketua Tim Senior (Joseph Sinaga) serta Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas (I G. A. Masningrat). Pada pertemuan yang berjalan dengan konsep diskusi ini dilakukan dialog antara tim BAKN DPR RI, entitas yang diperiksa (Pemerintah Provinsi Bali, PT. BPD Bali atau Universitas Udayana), BPK RI dan BPKP Perwakilan Bali.

UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE 104 TAHUN 2012

Denpasar, Mei 2012

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 104, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan pada Senin, 12 Mei 2012. Upacara yang dilaksanakan di halaman kantor ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan, para pejabat struktural dan Ketua Tim Senior (KTS) serta seluruh pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Pada upacara kali ini yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan (Tri Heriadi) sedangkan A.A. Bagus Bayu Putra (Staf Sub Bagian Umum) bertugas sebagai Komandan Upacara. Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Tifatul Sembiring) selaku Ketua Umum Peringatan Harkitnas Tahun 2012 yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, ditegaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan selama 104 tahun telah mengalami pasang surut seiring dengan perubahan jaman dan tuntutan masyarakat. Lebih lanjut ditekankan bahwa perubahan dan tuntutan ini mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan berada dan menyatu



dalam proses perjalanan sejarah Bangsa Indonesia yang telah berkali-kali mendapatkan gangguan, tantangan, hambatan dan bahkan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. "Oleh karena itu, dalam rangka tetap menjaga konsistensi dan kesinambungan nilai-nilai kebangsaan yang telah dirintis oleh para pendahulu, kita tidak boleh lengah dan lupa akan makna hakiki nilai-nilai kebangsaan tersebut," ujar Inspektur Upacara dalam sambutan sepanjang 6 halaman tersebut.

Denpasar, Juli 2012

Dalam rangka kunjungan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), 50 mahasiswa dan 2 orang dosen pendamping Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang bertandang ke Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Selasa, 17 Juli 2012. Rombongan diterima oleh para Kepala Sub Bagian di lingkungan Perwakilan Provinsi Bali bertempat di Auditorium Kantor Perwakilan.

Setelah perkenalan dan penyampaian tujuan kunjungan dari perwakilan rombongan yang disampaikan oleh salah seorang dosen pendamping (Indah Anis K.), giliran Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan/Kepala Subag Setlan (Ida Bagus Ketut Sidhastu) memberikan sambutan dan pemaparan mengenai BPK RI dan profil BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut Kepala Subag Setlan antara lain memaparkan tentang Landasan Hukum BPK RI (Konstitusional dan Operasional), Kedudukan BPK Berdasarkan UUD '45 (sebelum dan sesudah amandemen), Tugas BPK, Wewenang BPK, Visi dan Misi BPK, Keanggotaan BPK RI dan Lingkup Tugasnya, Sejarah Terbentuknya Perwakilan Provinsi Bali, Struktur Organisasi dan Entitas Pemeriksaan di Perwakilan Provinsi Bali, Jenis dan Siklus Pemeriksaan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Kegiatan Perwakilan Provinsi Bali.

Para mahasiswa tampak antusias mengikuti jalannya pemaparan, terlebih pada sesi tanya jawab. "Jika di Kantor Akuntan Publik (KAP) ada aturan maksimal hanya boleh mengaudit 2 kali di tempat yang sama, bagaimana dengan BPK? Adakah upaya untuk menjaga supaya tetap independen?" tanya Wahyuli Ambarwati Wulandari, salah seorang mahasiswa dari Jurusan Akuntansi Semester IV Angkatan 2010. Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Subag Setlan menjelaskan bahwa untuk menjaga supaya auditor tetap independen, BPK telah menetapkan Kode Etik dalam rangka tugas pemeriksaan. Auditor juga tidak diperbolehkan memeriksa di entitas yang sama setelah 2 kali berturut-turut. "Auditor diwajibkan untuk melapor jika ada keluarga yang bekerja di entitas tertentu. Selain itu auditor akan di-rolling dalam menjalankan tugas pemeriksaan dengan adanya mutasi secara berkala," tambah Kepala Subag Setlan. Acara ditutup dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama.



Pariwisata

Pura Uluwatu

Pura Luhur Uluwatu atau **Pura Uluwatu** merupakan pura yang berada di wilayah Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pura yang terletak di ujung barat daya Pulau Bali di atas anjungan batu karang yang terjal dan tinggi serta menjorok ke laut ini merupakan Pura Sad Kayangan yang dipercaya oleh orang Hindu sebagai penyangga dari 9 mata angin. Pura ini pada mulanya digunakan menjadi tempat memuja seorang pendeta suci dari abad ke-11 bernama Empu Kuturan. Ia menurunkan ajaran Desa Adat dengan segala aturannya. Pura ini juga dipakai untuk memuja pendeta suci berikutnya, yaitu Dang Hyang Nirartha, yang datang ke Bali pada akhir tahun 1550 dan mengakhiri perjalanan sucinya dengan apa yang dinamakan Moksah atau Ngeluhur di tempat ini. Kata inilah yang menjadi asal nama Pura Luhur Uluwatu.

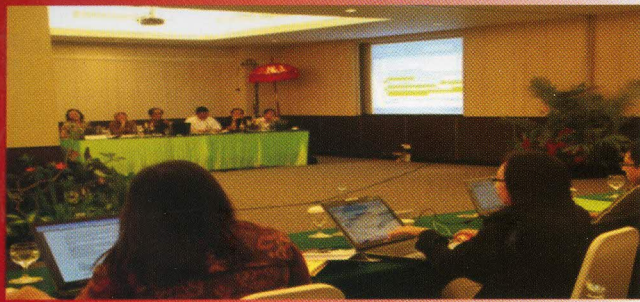
Pura Uluwatu terletak pada ketinggian 97 meter dari permukaan laut. Di depan pura terdapat hutan kecil yang disebut alas kekeran, berfungsi sebagai penyangga kesucian pura. Pura Uluwatu mempunyai beberapa pura pesanakan, yaitu pura yang erat kaitannya dengan pura induk. Pura pesanakan itu yaitu

Pura Bajurit, Pura Pererepan, Pura Kulat, Pura Dalem Selonding dan Pura Dalem Pangleburan. Masing-masing pura ini mempunyai kaitan erat dengan Pura Uluwatu, terutama pada hari-hari piodalan-nya. Piodalan di Pura Uluwatu, Pura Bajurit, Pura Pererepan dan Pura Kulat jatuh pada Selasa Kliwon Wuku Medangsia setiap 210 hari. Manifestasi Tuhan yang dipuja di Pura Uluwatu adalah Dewa Rudra

Pura Uluwatu juga menjadi terkenal karena tepat di bawahnya adalah pantai Pecatu yang sering kali digunakan sebagai tempat untuk olahraga selancar, bahkan even internasional seringkali diadakan di sini. Ombak pantai ini terkenal amat cocok untuk dijadikan tempat selancar selain keindahan alam Bali yang memang amat cantik.

Sumber : id.wikipedia.org





Konsinyering LHP LKPD TA 2011 pada 15 sd 21 Mei 2012



Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Bali TA 2011 pada 5 Juni 2012



Kunjungan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada 17 Juli 2012



Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Tingkat S1 dan S2



Senam Pagi rutin setiap Jumat di halaman kantor perwakilan



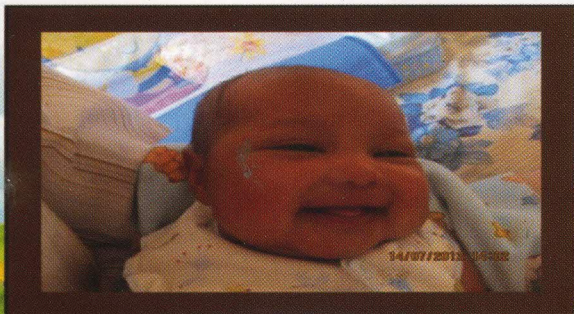
Selamat atas kelahiran

I PUTU RISHI NANDA
DENPASAR, 2 JUNI 2012
Putra dari :

NI WAYAN EKA SANTI DEWI (Staf Sub Auditorat Bali I)

Dan

I KOMANG AGUS PASEK DARMA PUTRA

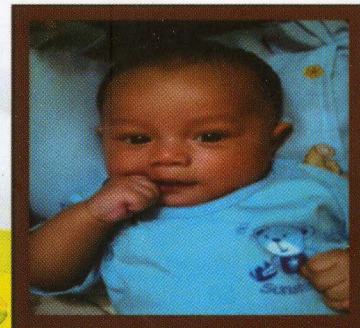


FACHRI ACHMAD CALIEF MAULANA
BANDUNG, 3 JULI 2012
Putra dari :

DWITIYA NARESWARI SITI FATIMAH (Staf Sub Bagian Umum)

Dan

ANGGA SIANGGANA



REDAKSI

PENGARAH : TRI HERIADI

PENANGGUNG JAWAB : I KETUT SUJANA ARTHA

KETUA : I G.A. MASNINGRAT

SEKRETARIS : I.B. KETUT SIDHASTU

ANGGOTA : NI NYOMAN AYU SUARTINI, BEVY KARTIKASARI, IKA SEVIANI PUJI LESTARI, I GUSTI AGUNG ISTRI AGUNG, FEBRIANSON ONDOS PARLINDUNGAN

ALAMAT REDAKSI : JALAN D.I. PANJAITAN NO.2, RENON, DENPASAR 80000

TELEPON (0361) 229193 FAXIMILE (0361) 229184

WEBSITE : www.denpasar.bpk.go.id